

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON



Laporan Keuangan (audited)

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi
Cirebon 45132

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Cirebon, 31 Desember 2021

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon,



Dr. H. Sumanta, M.Ag
NIP. 196605161993031004

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	50
VI. Lampiran dan Daftar	

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	2
Tabel 3 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel 4 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP	18
Tabel 5 : Perbandingan Realisasi PNBP TA 2021 dan 2020	19
Tabel 6 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2021	20
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021	20
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020	21
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020	22
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020	23
Tabel 11 : Perbandingan Belanja Modal TA 2021 dan 2020	24
Tabel 12 : Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020	24
Tabel 13 : Rincian Persediaan	27
Tabel 14 : Rincian Aset Tetap	29
Tabel 15 : Rincian Piutang Jangka Panjang	34
Tabel 16 : Rincian Aset Lainnya	34
Tabel 17 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek	36
Tabel 18 : Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 dan 2020	38
Tabel 19 : Rincian Beban Pegawai Pada Tahun 2021 dan 2020	39
Tabel 20 : Rincian Beban Persediaan Pada Tahun 2021 dan 2020	40
Tabel 21 : Rincian Beban Barang dan Jasa Pada Tahun 2021 dan 2020	41
Tabel 22 : Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020	42
Tabel 23 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020	43
Tabel 24 : Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020	43
Tabel 25 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020	44
Tabel 26 : Rincian Surplus / (Defisit) Dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2021 dan 2020	45
Tabel 27 : Rincian Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020	46

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

*Jl. PERJUANGAN BY PASS SUNYARAGI CIREBON
TELEPON (0231) 481264, FAXIMILE (0231) 489926*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cirebon, 31 Desember 2021

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon,



Dr. H. Sumanta, M.Ag

NIP. 196605161993031004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp50.832.104.875 atau mencapai 82,70 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp61.465.585.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp147.506.259.374 atau 92,14 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp160.087.426.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	% Real. thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	61.465.585.000	50.832.104.875	82,70	43.286.854.298
Belanja Negara	160.087.426.000	147.506.259.374	92,14	121.578.910.947

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2021.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp437.506.257.441 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3.024.476.710 Aset Tetap sebesar Rp433.784.828.665 dan Aset Lainnya sebesar Rp700.952.066.

Sementara itu jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp14.900.721.830 dan Jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp422.645.330.999.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/ (penurunan)	
	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	3.024.476.710	3.057.282.600	(32.805.890)	(1,07)
Aset Tetap	433.784.828.665	423.643.770.476	10.141.058.189	2,39
Aset Lainnya	700.952.066	648.579.327	52.373.739	8,07
Jumlah Aset	437.506.257.441	427.390.152.403	10.116.105.038	2,36
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	14.900.721.830	14.900.721.830	0	0
Ekuitas				
Ekuitas Dana Lancar				
Ekuitas Dana Investasi				
Jumlah Ekuitas	422.645.330.999	412.489.430.573	10.155.900.426	2,37
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	437.546.052.829	427.390.152.403	10.155.900.426	2,37

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan_LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp50.366.687.457, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp138.183.306.768 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai Rp87.816.619.311. Surplus dari kegiatan non operasional adalah sebesar Rp420.897.415 sehingga entitas mengalami Defisit sebesar Rp87.395.721.896.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp413.327.801.454 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp87.395.721.896, kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp97.011.676.009 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp422.671.316.467.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021		TA 2020	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	61.465.585.000	50.832.104.875	82,70	43.286.854.298
Jumlah Pendapatan		61.465.585.000	50.832.104.875	82,70	43.286.854.298
BELANJA	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	60.219.146.000	58.983.889.951	97,95	58.983.889.951
2. Belanja Barang	B.2.2.	35.742.649.000	33.467.127.837	93,63	33.467.127.837
3. Belanja Modal	B.2.3.	21.628.024.000	21.355.493.100	98,74	21.355.493.100
4. Belanja Sosial	B.2.4.	7.772.400.000	7.772.400.000	100,00	7.772.400.000
Jumlah Belanja		125.362.219.000	121.578.910.947	96,98	121.578.910.947

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	0	0
Jumlah Kas dan Bank		0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.2	3.020.055.000	3.020.055.000
Persediaan	C.1.3	44.217.100	37.227.600
Jumlah Aset Lancar		3.064.272.100	3.057.282.600
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2.1	270.024.645.240	269.779.306.240
Peralatan dan Mesin	C.2.2	71.732.237.703	60.354.742.014
Gedung dan Bangunan	C.2.3	153.964.045.465	148.819.001.398
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1.400.533.965	1.400.533.965
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	5.599.763.216	5.407.777.816
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(68.936.396.924)	(62.117.590.957)
Jumlah Aset Tetap		433.784.828.665	423.643.770.476
Piutang Jangka Panjang			
C.3			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		(4.000.000)	40.520.000
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		(4.000.000)	40.520.000
Jumlah Piutang Jangka Panjang		(4.000.000)	40.520.000
Aset Lainnya			
C.4			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	599.829.680	375.796.680
Aset Lain-Lain	C.4.2	1.936.574.853	778.445.382
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(1.835.452.469)	(505.662.735)
Jumlah Aset Lainnya		700.952.064	648.579.327
JUMLAH ASET		437.546.052.829	427.390.152.403
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	14.860.918.830	14.860.918.830
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.2	39.803.000	39.803.000
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14.900.721.830	14.900.721.830
JUMLAH KEWAJIBAN		14.900.721.830	14.900.721.830
EKUITAS			
C.6			
Ekuitas		422.645.330.999	412.489.430.573
JUMLAH EKUITAS		422.645.330.999	412.489.430.573
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		437.546.052.829	427.390.152.403

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN
31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1.	413.327.801.454	405.776.024.817	7.551.776.637	1,86
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2.	(87.395.721.896)	(70.740.280.012)	(16.655.441.884)	23,54
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		0	0		
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.	0	0		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.	0	0		
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.5.	(272.439.100)	0	(272.439.100)	0
Koreksi Lain-lain	E.6.	0	0		
Transaksi Antar Entitas	E.7.	97.011.676.009	78.292.056.649	18.719.619.360	23,91
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		9.343.515.013	7.551.776.637	1.791.738.376	23,72
EKUITAS AKHIR	E.8.	422.671.316.467	413.327.801.454	9.343.515.013	2,26

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Umum

A. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 ayat (g) mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan Keuangan adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (2) a. Sedangkan standar akuntansi yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan IAIN Syekh Nurjati didasarkan kepada Basis Kas untuk pengakuan pendapatan & belanja dalam LRA dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan, maka dalam Laporan Keuangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013 akan dilampirkan sebagian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual.

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Agama.
9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.

A.2. ALOKASI ANGGARAN TIGA TAHUN TERAKHIR

Alokasi Anggaran Tiga Tahun Terakhir

IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan salah satu satuan kerja Kementerian Agama. Anggaran IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019 IAIN Syekh Nurjati Cirebon mendapatkan alokasi anggaran sebesar [Rp.144.762.037.000](#), pada 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar [Rp.125.362.219.000](#), dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan alokasi anggaran menjadi sebesar [Rp.160.087.426.000](#).

**Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan**

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan Aset lainnya untuk Penyusunan neraca dan laporan barang milik negara seta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

IAIN Syekh Nurjati Cirebon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran

yang diterapkan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran / penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan- LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset Diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan pajak atau bukan pajak yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun sampai dengan periode pelaporan belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke kas negara
- Pendapatan yang masih harus diterima disajikan dalam neraca senilai jumlah pendapatan yang telah menjadi kewajiban dari wajib bayar namun belum diterima pembayarannya sampai akhir periode pelaporan
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian;

- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

**Penyusutan
Tetap** **Aset**

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Panjang

Jangka

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dank as yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7. Refocussing Kegiatan / Realokasi Anggaran

Tahun 2021 merupakan tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan pada tahun 2021 ini hampir diseluruh dunia mengalami apa yang disebut dengan pandemi virus covid-19 sehingga berpengaruh pada semua sektor termasuk pada sektor perekonomian nasional. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor B-698.1/DJ.UOT.01.3/03/2020 tanggal 26 Maret 2021 tentang Refokussing kegiatan untuk penanganan penyebaran Covid-19, Satker IAIN Syekh Nurjati Cirebon terdapat Refokussing anggaran sebesar Rp6.728.299.000 yang diambil dari anggaran belanja perjalanan dinas pada kegiatan yang menggunakan anggaran BOPTN Rupiah Murni.